

KAJIAN EKONOMI PROGRAM LONGGAR DI MAKASSAR *(Study on Economic Benefit of Longgar Program in Makassar)*

Abdul Razak Munir¹, Maat Pono², Sudarmono³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar 90245

³Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

e-mail: arazak.munir@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research are; (1) To identify the community's response to the Lorong Garden (Longgar) program in Makassar; (2) Analyze the economic benefits of the Longgar program in Makassar, especially in improving the welfare of the community; (3) Formulate development strategy of Longgar program in Makassar City. Location of this study will be conducted in Makassar City. The population of this research is all groups of Kelompok Wanita Tani in Makassar City. The activity of this study in the data collection using observation approach and questionnaire. The collected data is then edited, tabulated, and verified first. The data analysis methods used in this study consist of: (1) Descriptive analysis and, (2) T-statistical analysis of paired t tests. The result of the research shows that the perception of society on the garden garden program is positive and high. From the results of questionnaires distributed to the respondents it can be seen that the level of knowledge, objectives, benefits and community support for the Lorong Garden program is high. The community accessed information about Lorong Garden from the socialization activities by the Penyuluh from Badan Ketahanan Pangan and was very supportive for the competition between Lorong Garden with comprehensive criteria. The results also show the economic benefits of the Lorong Garden Program which increases with time. The paired-sample t test results show significant difference in KWT revenues between 2014-2015 and 2016-2017 and that income tends to increase with time.

Keywords: Economic Benefit, Program Development, Lorong Garden.

1. PENDAHULUAN

Lorong Garden adalah sebuah program Pemerintah Kota Makassar, yang inisiatifnya dari masyarakat tetapi dikembangkan pemkot setempat. Program ini selain dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lorong-lorong di Kota Makassar. Lorong yang biasanya kumuh dan sering menjadi sumber penyakit sosial, ingin diubah menjadi lorong yang asri, sejuk, indah, bahkan ditargetkan menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat. Lorong yang ada ditata agar lebih indah, bersih dan hijau dengan tanaman sayur, tomat, cabai dan lainnya. Masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman yang dapat bernilai ekonomis atau dapat dikonsumsi sehari-hari. Untuk menunjang program tersebut, pemerintah berupaya membuat Badan Usaha Lorong yang

nantinya tanaman hasil dari lorong garden tersebut dapat dijual di badan usaha tersebut. Dengan program ini maka diharapkan lorong-lorong yang ada menjadi lebih produktif, bersih dan tertata indah.

Program longgar merupakan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan sebagai leading sector program ini, yang tidak bekerja sendiri dalam pelaksanaannya, keterlibatan SKPD-SKPD lainnya, Sektor Privat, dan masyarakat warga lorong menjadikan sebuah rantai kolaborasi (helix chain) yang kuat dalam pencapaian visi dan misi Kota Makassar.

Harapan dari Pemerintah Kota terhadap kegiatan longgar adalah untuk menjadikan Kota Makassar bersih tidak hanya di jalan-jalan umum tetapi juga di lorong-lorong jalan. Karena pada umumnya dikota-kota lainnya saat kita melihat

jalan protokol itu sangat bersih tetapi ketika memasuki lorong di suatu daerah maka akan terlihat sampah yang berserakan.

Salah satu prestasi dari Kegiatan Longgar ini adalah pada saat Acara Asean Mayors Forum (AMF), Lorong Garden ini telah mendapat apresiasi dari walikota-walikota dari negara tetangga dan juga telah menjadi inspirasi bagi delegasi Filipina untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, saat kunjungan dari Kementerian Pertanian program ini mendapat apresiasi dan bahkan akan diusulkan menjadi program nasional kementerian pertanian.

Program Lorong Garden (Longgar) ini diinisiasi oleh Walikota Makassar yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota Makassar Tahun 2014 – 2019, dan merupakan bagian dari program utama Walikota Makassar, yaitu GEMAR MTR (Gerakan Makassar Tidak Rantasa). Launching program ini dilakukan pada tahun 2015 dan secara terus menerus dilaksanakan setiap tahunnya.

Program Longgar tentunya tidak hanya mengubah wajah lorong-lorong di Kota Makassar yang kotor dan gersang menjadi bersih dan hijau, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Melalui “Urban Farming” lorong-lorong kota dipenuhi dengan kebun-kebun vertical yang ditanami tanaman produktif seperti sayur-sayuran dan buah, serta tanaman hias. Saat panen, dapat dikonsumsi oleh warga dan juga dapat dijual. Hijau dan Produktif menjadi warna lorong-lorong kota.

Program Longgar memberikan dampak positif dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat lorong akan pentingnya lingkungan lorong yang bersih dan hijau serta tertata rapi, selain itu juga meningkatkan silaturahmi antar keluarga dan mengurangi tindakan-tindakan kriminal yang sering terjadi di lorong.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Konsep Good Governance

Menurut World Bank, Good Governance ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah satu alokasi atau investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik

maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan menurut UNDP Good Governance menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integritas serta untuk kesejahteraan rakyatnya (Teguh, 2011: 22)

Dinamika perjalanan praktek pemerintahan yang senantiasa berhadapan dengan lingkungan dan harapan masyarakat yang juga menjadi pendorong berubahnya paradigma pemerintahan secara konseptual. Tuntutan terhadap perbaikan kinerja pemerintah membuat pemerintah mencari praktek yang tepat yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini juga kemudian secara akademik melahirkan kajian-kajian tentang konsepsi implementasi pemerintahan yang dapat memenuhi harapan masyarakat dan tuntutan lingkungan strategis tersebut. Konsep yang paling aktual dalam konteks ini adalah konsep good governance.

Dari uraian tersebut, maka unsur utama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UNDP terdiri atas tiga macam, yaitu the state (negara/pemerintah), the private sector (swasta), dan civil society organization (organisasi masyarakat). Hubungan di antara ketiga unsur utama dalam penyelenggaraan governance tentunya saling mempengaruhi, saling membutuhkan, atau bahkan saling ketergantungan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Widodo, 2008:110).

2.2 Prinsip-Prinsip Good Governance

Good Governance awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya, maka ditetapkan Good Corporate Governance. Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam Governance Corporate adalah: transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas. Prinsip-prinsip Good Governance diatas cenderung kepada dunia usaha, sedangkan bagi suatu organisasi publik bahkan dalam skala Negara prinsip-prinsip tersebut lebih luas

menurut Universitas Sumatera Utara UNDP melalui LAN, menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik Good Governance, yaitu: Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menyimpulkan sembilan aspek fundamental dalam perwujudan clean and good governance, (Pohan, 2014) : partisipasi (participation), penegakan hukum (rule of law), transparansi (transparency), responsive (responsiveness), orientasi kesepakatan (consensus orientation), keadilan (equity), efektifitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency), akuntabilitas (accountability), dan visi strategi (strategic vision).

2.3 Konsep Kebijakan Publik

Konsep Kebijakan Publik memiliki banyak definisi atau pengertian, Danim (2005: 20-23) memberikan pengertian kebijakan sebagai “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

Danim secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi:

- (1) bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan,
- (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,
- (3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,
- (4) bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu

masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu,

- (5) bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Dalam pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Rusli (2013: 9) menyatakan bahwa Kebijakan Publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (tool) keberadaan Kebijakan Publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan bisa - dan seringkali terjadi - diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting.

Lebih lanjut Wahab (2005: 3) mengutip pendapat Friedrich mengartikan kebijakan: Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Harsono (2002: 67) mengatakan implementasi adalah “suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”. Hal senada disampaikan Wahab (1997: 79) mengatakan

secara umum istilah implementasi berarti “pelaksanaan atau penerapan”. Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Hal lain yang dikemukakan oleh Agustino (2006: 138) bahwa Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka dianggap klien.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. (Wahab, 2005: 65).

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi sebagai: tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. (Agustino, 2006: 139)

Menurut Merilee S. Grindle mengatakan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan. (Winarno, 2012:149).

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari

program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. (Sumaryadi, 2005: 79).

Implementasi kebijakan sendiri merupakan menurut Dunn (2003: 132) “adalah melaksanakan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.” Menurut Widodo (2007: 88) mengemukakan bahwa, “implementasi kebijakan merupakan proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata.” Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

2.5 Komunitas Urban Farming

Kegiatan urban farming atau berkebun di kota muncul sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat menyikapi semakin terbatasnya lahan di kota-kota besar. Tingkat polusi yang makin parah dan minimnya kawasan hijau membuat kota semakin gersang. Kesadaran ini yang memunculkan gerakan urban farming di kota-kota besar di seluruh dunia. Secara umum urban farming merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan sempit dipertanian. Kegiatan urban farming mencakup kegiatan produksi, distribusi, hingga pemasaran produk-produk pertanian yang dihasilkan.

Definisi urban farming yang diberikan oleh FAO, adalah sebuah industry yang memproduksi, memproses, dan memasarkan produk dan bahan bakar nabati, terutama dalam menanggapi permintaan harian konsumen di dalam perkotaan, yang menerapkan metode produksi intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan untuk menghasilkan beragam tanaman dan hewan ternak. Definisi urban farming juga diberikan oleh Council on Agriculture, Science and Technology, (CAST), Mencakup aspek kesehatan lingkungan, remediasi, dan rekreasi. Kebijakan di berbagai kota juga memasukkan aspek keindahan kota dan kelayakan penggunaan tata ruang yang berkelanjutan dalam menerapkan pertanian urban. Definisi urban farming menurut Badan Pusat Statistik, adalah suatu aktivitas pertanian di dalam atau di sekitar perkotaan yang melibatkan

keterampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidaya dan pengolahan makanan. Sedangkan menurut Martin Bailkey (2000), membuat definisi urban farming sebagai rantai industri yang memproduksi, memproses dan menjual makanan dan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumen kota. Semua kegiatan dilakukan dengan metoda using dan re-using sumber alam dan limbah perkotaan.

Kegiatan urban farming dilakukan sebagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan bagi petani, khususnya bagi mereka yang mata pencarian utamanya dari bertani. Sedangkan bagi masyarakat kota yang getol mengembangkan urban farming, kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari rekreasi. Perbedaan antara pertanian urban dan non-urban terbilang cukup besar, dan tantangan yang ada pada pertanian urban bisa disebut sebagai kekuatan yang dimiliki. Variasi kondisi sosio-ekonomi perkotaan, budaya, hingga geografi, iklim, dan luas lahan menimbulkan berbagai inovasi dan kebijakan pemerintahan setempat. Diversitas yang membedakan antara satu kota dan kota lain mampu menciptakan keunikan tersendiri.

Pertanian ini pun dapat menimbulkan berbagai gerakan lokal seperti; "foodies", "locavores", "organic growers" dan sebagainya yang berfungsi sebagai sarana berbagi informasi dan fasilitas jual beli produk setempat, sehingga mendatangkan penghasilan, mengurangi risiko pestisida dan bahan kimia konsumsi masyarakat, hingga meningkatkan ketahanan pangan karena pertanian urban dikatakan memperpendek jarak antara produsen dan konsumen sehingga bahan pengawet dan proses tambahan tidak dibutuhkan. Hal ini membuat konsumen mendapatkan jaminan bahan pangan yang didapatkan begitu segar. Akses secara ekonomi maupun geografi kepada bahan pangan bernutrisi, adalah salah satu perspektif dalam pertanian urban. Dengan meningkatnya populasi dunia di kawasan urban, kebutuhan terhadap bahan pangan yang segar dan aman semakin meningkat. Wilayah yang memiliki kerawanan pangan akan memiliki pilihan yang terbatas kepada bahan pangan karena keterbatasan akses, dan masyarakatnya akan cenderung memilih makanan terproses seperti makanan cepat saji atau makanan dalam kemasan yang diproduksi oleh industri, dan yang memiliki kalori tinggi dan

nutrisi rendah. Model-mdoel yang pernah dilakukan dengan terbentuknya komunitas urban farming di Indonesia pada umumnya adalah sebagai berikut ini:

- 1) Memanfaatkan lahan tidur dan lahan kritis,
- 2) Memanfaatkan sisa lahan yang tidak produktif,
- 3) Memanfaatkan ruang terbuka hijau (privat dan publik),
- 4) Mengoptimalkan kebun sekitar rumah, dan
- 5) Menggunakan ruang (verticultur)

3. METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kelompok Wanita Tani Kota Makassar yang terdaftar di Kantor Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 123 kelompok. Pada kondisi dimana jumlah populasi sangat besar, dengan menggunakan tingkat presisi minimal 10%, akan dilakukan teknik sampling. Penentuan sampel akan dilakukan secara proporsional (Setiawan, 2007).

Dengan menggunakan rule of thumb dalam penelitian yakni jumlah sampel minimum adalah 10% dari keseluruhan populasi, maka sampel adalah 12 KWT dengan pertimbangan keterwakilan maka ditentukan jumlah sampel sebanyak 15 KWT. Adapun lokasi kegiatan kajian ini dilaksanakan di Kota Makassar.

Instrumen yang digunakan adalah berupa self administered kuesioner untuk mendapatkan data primer dengan wawancara tatap muka langsung dengan responden, yakni Kelompok Wanita Tani di Kota Makassar.

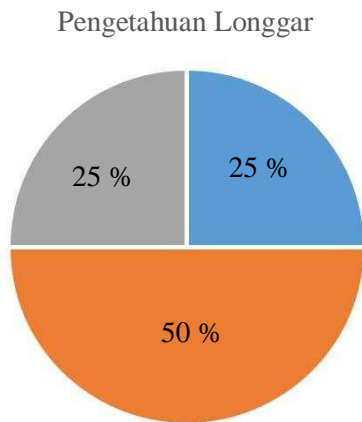
Metode analisis dalam penelitian ada dua; (1) Analisis Deskriptif, Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Best, 1982 dalam Sukardi, 2004). Analisis deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Analisis deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian

berlangsung. Pada penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan persepsi sampel mengenai program Lorong Garden. (2) Analisis Inferensial, Analisis Inferensial adalah analisis dengan menggunakan data statistik untuk menguji hipotesis dan melakukan generalisasi. Pada penelitian ini diuji hipotesis mengenai dampak ekonomi Program Lorong Garden dengan menggunakan alat statistik Uji t sample berpasangan (*Paired-sample t test*). Dalam penelitian ini berhubung program Lorong Garden ini masih relatif baru maka pendapatan kelompok Wanita Tani (KWT) di proxy dengan penghematan setiap hari untuk pembelian sayur mayur.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Analisis Deskriptif

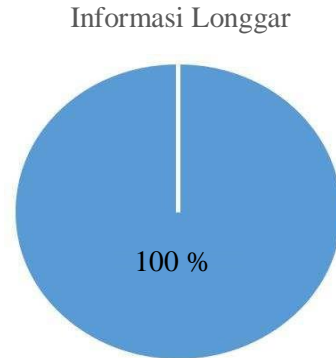
Profil responden secara keseluruhan adalah ibu Rumah Tangga dengan umur antara 46 tahun sampai 70 tahun. Agama semuanya beragama Islam. Etnis suku berupa Suku Bugis, Makassar dan Enrekang. Tingkat Pendidikan sekitar 73% tamat SMA/ sederajat dan 27% tamat Perguruan Tinggi.



Gambar 1
Tingkat Pengetahuan Responden Mengenai Program Longgar

Pada gambar diatas terlihat bahwa ketika ditanyakan apakah responden mengetahui tentang Program Lorong Garden, setengah (50%) dari responden menyatakan sangat tahu mengenai program Lorong Garden, sedang 25% menyatakan cukup tahu dan sisanya menyatakan kurang tahu. Hasil ini memperlihatkan bahwa

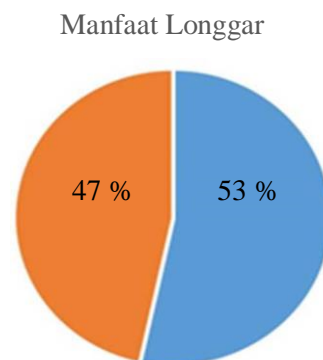
sosialisasi program Longgar selama ini cukup efektif untuk mengkomunikasikan program Longgar ini.



Gambar 2
Sumber Informasi Program Longgar

Pada Gambar diatas terlihat bahwa semua responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan/mengakses informasi mengenai program Lorong Garden melalui sosialisasi. Ini berarti peran para penyuluh dari Dinas Ketahanan Pangan sangat penting dalam sosialisasi dan penyelenggaraan program Lorong Garden ini.

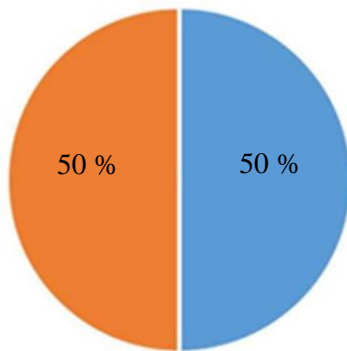
Pada gambar diatas terlihat respon responden ketika ditanyakan mengenai tujuan program Lorong Garden sekitar 50% atau setengah menyatakan untuk estetika (keindahan) lorong, 25% menyatakan untuk memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) dan sisanya 25% menyatakan untuk ketahanan pangan. Persepsi responden diatas sejalan dengan tingkat pengetahuan responden mengenai Program Lorong Garden yang cukup tinggi, hal ini berarti sosialisasi oleh para penyuluh Dinas Ketahanan Pangan sangat efektif dalam komunikasi dan keberhasilan program Lorong Garden.



Gambar 4 Manfaat Lorong Garden

Pada gambar di atas terlihat respon responden ketika ditanyakan mengenai manfaat program Lorong Garden yang mereka rasakan. Sekitar 53% atau lebih dari setengah menyatakan; mengetahui cara berkebun di rumah dengan lahan sempit dan 47% menyatakan; menciptakan kondisi lorong yang rapi, indah, asri dan sejuk. Hal ini memperlihatkan bahwa responden sudah merasakan manfaat dari Program Lorong Garden ini.

Dukungan Warga

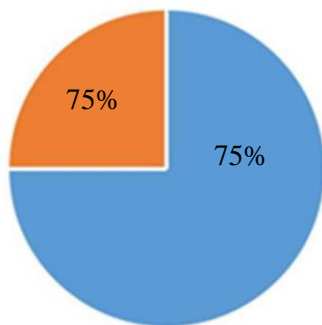


Gambar 5

Dukungan Warga untuk Program Lorong Garden

Pada gambar diatas terlihat respon pada responden mengenai pertanyaan dukungan warga berupa tenaga, materi dan pikiran. Setengah (50%) dari responden menyatakan bahwa warga sangat mendukung, sedang setengahnya lagi menyatakan warga mendukung. Secara keseluruhan bisa dikatakan kalau dukungan warga sangat tinggi karena memang manfaat program Lorong Garden ini sangat terasa oleh masyarakat Kota Makassar.

Kompetisi antar Longgar



Gambar 6

Kompetisi antar Longgar

Dari gambar diatas terlihat respon dari responden mengenai pertanyaan mengenai nilai prestasi seperti kompetisi antar lorong garden apakah dapat mempengaruhi warga untuk lebih rajin melakukan kegiatan Longgar? Sekitar 75% menyatakan sangat setuju dan sisanya 25% menyatakan setuju. Kompetisi antar longgar diyakini sebagai upaya sosialisasi yang efektif untuk menumbuhkan kebanggaan warga kota. Pemenang Lorong Garden yang dikunjungi oleh Walikota Makassar dan pejabat-pejabatnya akan mendorong pada KWT lain untuk lebih giat dan rajin dalam melakukan kegiatan longgar selain manfaat yang telah dirasakannya.

4.2 Hasil Analisis Inferensial

Manfaat ekonomi Program Lorong Garden akan dianalisis dengan menggunakan peralatan statistik yakni Uji t sample berpasangan atau sering disebut sebagai paired-sampel t test. Uji t untuk data sampel berpasangan membandingkan rata-rata dua variabel untuk suatu grup sampel tunggal. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel untuk tiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai nol.

Kriteria data untuk uji t sampel berpasangan : (1) Data untuk tiap pasang yang diuji dalam skala interval atau rasio. (2) Data berdistribusi normal. (3) Nilai variannya dapat sama ataupun tidak.

Uji t berpasangan (*paired t-test*) umumnya menguji perbedaan antara dua pengamatan. Uji seperti ini dilakukan pada Subjek yang diuji untuk situasi sebelum dan sesudah proses, atau subjek yang berpasangan ataupun serupa (sejenis).

Untuk itu dibutuhkan data berupa pendapatan rata-rata dari Kelompok Wanita Tani dalam rentang tahun 2014 – 2015 dan tahun 2016 -2017. Seperti telah disinggung sebelumnya berhubung program Lorong Garden ini masih relatif baru sehingga data mengenai pendapatan per bulan Kelompok Wanita Tani relatif tidak tersedia. Untuk itu dilakukan proxy dengan menanyakan penghematan rata-rata per hari untuk pembelian sayur mayur. Logikanya ketika belum ada program Lorong Garden ibu-ibu anggota KWT harus mengeluarkan sejumlah rupiah tiap hari untuk pembelian sayur mayur, setelah adanya program Lorong Garden di KWT

mereka, maka penghematan per hari itu dianggap sebagai pendapatan.

Tabel: 1
Pendapatan rata-rata KWT responden
2014 -2015 dan 2016 -2017

No.	2014 - 2015	2016 -2017
1.	150,000	600,000
2.	150,000	660,000
3.	150,000	300,000
4.	150,000	300,000
5.	300,000	750,000
6.	150,000	600,000
7.	300,000	750,000
8.	300,000	750,000
9.	240,000	450,000
10.	240,000	600,000
11.	150,000	540,000
12.	300,000	690,000
13.	150,000	300,000
14.	300,000	600,000
15.	150,000	450,000

Sumber: data diolah, 2017

Hipotesis yang diajukan adalah:

H_0 : rata-rata pendapatan sampel sebelum dan sesudah pelaksanaan program lorong garden adalah sama atau tidak berbeda secara nyata

H_1 : rata-rata pendapatan sampel sebelum dan sesudah pelaksanaan program lorong garden adalah tidak sama atau berbeda secara nyata.

Jika hasil uji t sampel berpasangan memperlihatkan nilai t hitung yang lebih besar daripada nilai t tabel (5%, n-1) maka H_0 ditolak dengan demikian ada perbedaan pendapatan sampel sebelum dan sesudah pelaksanaan program lorong garden dengan

kata lain bahwa program lorong garden adalah bernilai ekonomis yang nyata.

Namun jika hasil uji t sampel berpasangan memperlihatkan nilai t hitung yang lebih kecil daripada nilai t tabel (5%, n-1) maka H_0 gagal ditolak dengan demikian tidak ada perbedaan pendapatan sampel sebelum dan sesudah pelaksanaan program lorong garden dengan kata lain bahwa program lorong garden adalah tidak memiliki nilai ekonomis yang nyata.

Tabel 2: Hasil Uji Sampel berpasangan

Pair	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
1 Sebelum	212000.00	15	71234.021	18392.545
1 Sesudah	556000.00	15	162296.026	41904.654

Pair	N	Correlation	Sig.
1 Sebelum & Sesudah	15	.670	.006

Pair	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
1 - Sesudah	344000.000	126197.125	32583.957	413895.638	274114.362	-10.557	14	.000

Dari hasil tersebut diatas terlihat bahwa rata-rata pendapatan KWT pada tahun 2014 – 2015 adalah Rp 212.000 per bulan dengan deviasi Standar 71.234,021 dan pada tahun 2016 – 2017 adalah Rp. 556.000 per bulan dengan deviasi Standar 162.296,026. Hasil korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,670 dengan nilai Signifikansi 0,000. Hal ini berarti ada hubungan yang cukup erat antar sampel atau korelasi signifikan secara statistik. Dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : rata-rata pendapatan sampel sebelum dan sesudah pelaksanaan program lorong garden adalah = 0

H_1 : rata-rata pendapatan sampel sebelum dan sesudah pelaksanaan program lorong garden adalah \neq 0.

Dengan hasil signifikansi sebesar 0,000 bisa diambil kesimpulan untuk menolak H_0 karena level signifikansi yang jauh lebih kecil dari pada

Alpha (0,05). Dengan hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa program Lorong Garden memiliki manfaat ekonomi yang meningkat.

Hasil uji statistik diatas menguji hipotesis yang menyatakan bahwa program Lorong Garden memiliki manfaat ekonomi, ini berarti program lorong garden yang digagas oleh pemkot Makassar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kota Makassar pada umumnya dan para ibu-ibu anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) pada khususnya.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis Inferensial yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap program Lorong garden adalah positif/tinggi. Dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden terlihat bahwa tingkat pengetahuan, tujuan, manfaat dan dukungan masyarakat terhadap program Lorong Garden termasuk tinggi. Masyarakat mengakses informasi mengenai Lorong Garden dari kegiatan sosialisasi oleh para penyuluh Dinas Ketahanan Pangan dan sangat mendukung untuk lomba prestasi antar Lorong Garden dengan kriteria yang komprehensif.
2. Program Lorong Garden memperlihatkan adanya manfaat ekonomi nyata yang meningkat seiring dengan waktu. Hasil Uji t sampel berpasangan memperlihatkan perbedaan yang nyata (signifikan) akan pendapatan KWT antara tahun 2014-2015 dan tahun 2016-2017 dan pendapatan itu meningkat seiring dengan dengan waktu.

Adapun rekomendasi yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah Kota Makassar dan stakeholders untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan manfaat ekonomi program Longgar bagi masyarakat, dan pengembangan program longgar ke depan, sebagai berikut:

1. Pemerintah kota harus lebih pro aktif melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh mengenai program Lorong Garden ini dengan menggunakan berbagai

media dan teknik komunikasi agar program ini tujuan dan manfaat program ini lebih jelas bagi masyarakat.

2. Program Lorong Garden harus ditingkatkan pada tingkatan yang lebih tinggi seperti vertical garden, hidroponik atau bahkan aeroponik.
3. Pemerintah Kota bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Pihak swasta dapat menggunakan dana CSR untuk membina satu atau beberapa lorong Garden sebagai lorong angkat.
4. Pembentukan Koperasi Wanita Lorong untuk menampung hasil Lorong Garden. Dengan adanya koperasi KWT memiliki posisi tawar dan bisa menyalurkan hasil lorong garden dan bisa memenuhi kebutuhan anggotanya dan masyarakat dimana lokasinya berada.
5. Program pemerintah kota Makassar seperti lorong garden perlu mendapat dukungan semua pihak terutama masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam memaksimalkan setiap ruang yang ada dilahannya masing-masing agar membantu mengoptimalkan ruang/lahan terbuka hijau di Kota Makassar. Pengawasan pemerintah setempat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus dirutinkan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat.
6. Pemerintah Kota Makassar harus aktif menjalin kerjasama dengan semua elemen baik organisasi masyarakat, swasta, dan utamanya masyarakat sehingga program lorong garden bukan menjadi kewajiban dari petugas tapi semua elemen ikut aktif di dalamnya. Konsep Pentahelix dengan rumus ABCGM (Academician, Business, Community, Government, dan Media). Lima unsur itu harus kompak, saling support untuk

membangun dan mengembangkan Lorong Garden ke tingkat yang lebih tinggi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bailkey, Martin (2000). *Farming Inside Cities: Entrepreneurial Urban Agriculture in the United States*, Lincoln Institute of Land Policy Working Paper.
- Danim, S. (2004). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: PT RINEKA CIPTA.
- Dunn, W N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.
- Pohan, Chairil Anwar. (2014). “Perspektif Kepatuhan Pajak Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi”. *Prosiding Seminar STIAMI* Volume I, No. 02, Oktober 2014.
- Rusli, Budiman. (2013). *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publisher.
- Setiawan, N. (2007). *Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya*, Bandung: Universitas Pajajaran Press.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumaryadi, I N. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Teguh, Ambar. (2011). *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gava Media
- Wahab, A, S. (2005). *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2008). *Good Governance:: Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Instan Cendikia.
- Widodo. (2007). *Membangun Birokrasi Kinerja*. Malang: Bayu Media.
- Winarno,B. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus* edisi & Revisi Terbaru. CAPS. Yogyakarta.